



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008644.AH.01.07.TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
BARAYA JAWA BARAT ISTIMEWA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMAD HIKMAT S.H., sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 07 November 2025 yang dibuat oleh MOHAMAD HIKMAT S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BARAYA JAWA BARAT ISTIMEWA tanggal 07 November 2025 dengan Nomor Pendaftaran 6025110732100352 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BARAYA JAWA BARAT ISTIMEWA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan Perkumpulan:

BARAYA JAWA BARAT ISTIMEWA

Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 07 November 2025 yang dibuat oleh MOHAMAD HIKMAT S.H., yang berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 November 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 26 November 2025



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)



MOHAMAD HIKMAT, SH.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008644.AH.01.07.TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
BARAYA JAWA BARAT ISTIMEWA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
U. BURHAN SUJANI	3278040212470003	PENGURUS	KETUA
HENDRA IRAWAN	3278041003670008	PENGURUS	WAKIL KETUA
EDI SURYADI, S.PD	3204360801630003	PENGURUS	SEKRETARIS
DIAN NOPITASARI	3278095203850003	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
WATI SETIAWATI	3278034704820006	PENGURUS	BENDAHARA
JOJOK SITI HODIJAH	3278014607670004	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
DR. H. IMIH MISBAHUL MUNIR, DRS.,M.SI	3278090203640002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 November 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 26 November 2025

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)



MUHAMMAD HKMAT, SH.